



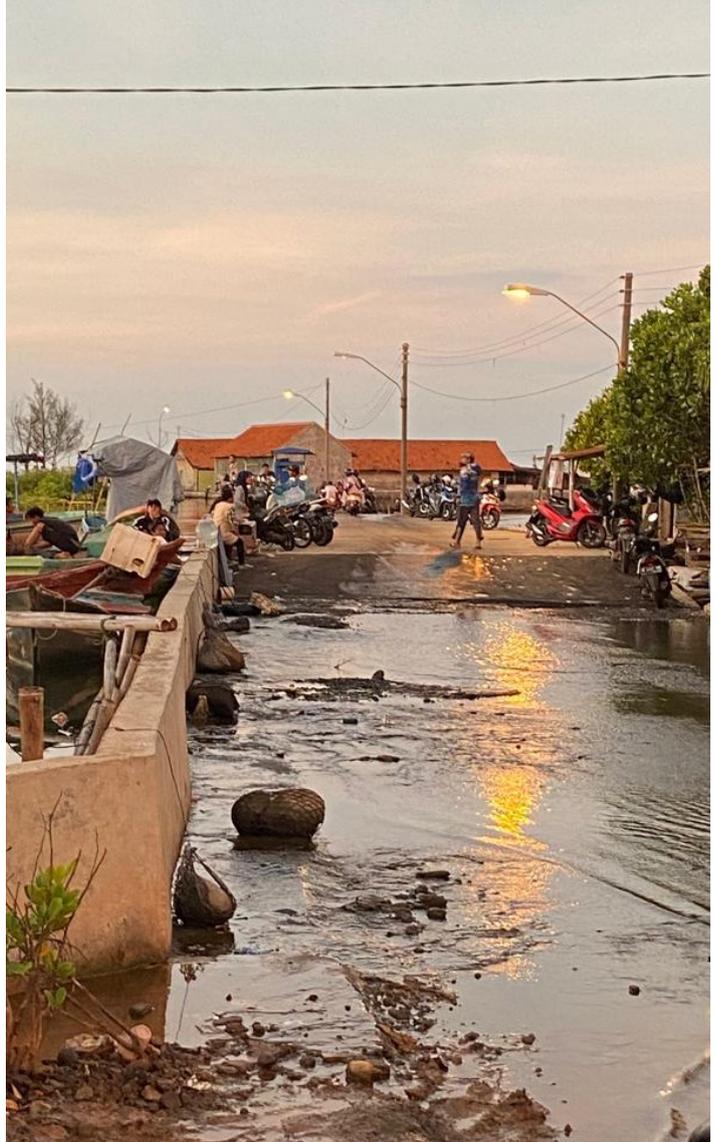
POLICY BRIEF
BANGKIT DARI BANJIR DI
PEKALONGAN:
KEBUTUHAN
KEBIJAKAN TRANSFORMATIF

In partnership with



ANCAMAN TENGGELAM, BESARNYA KERUGIAN DAN TINGGINYA KERENTANAN MASYARAKAT

- » Dinamika banjir pesisir (termasuk banjir air laut pasang atau rob) di Pekalongan, baik wilayah Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan, sangat kompleks karena sudah terjadi bertahun-tahun (dampaknya meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir) serta banyak faktor penyebabnya. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kupang yang membentang seluas lebih dari 18,000 Ha dari Kecamatan Petungkriyono di Kabupaten Pekalongan hingga muara Kali Pekalongan di Kota Pekalongan menjadi salah satu lansekap yang menghadapi dinamika ini. Studi Mercy Corps Indonesia (MCI) di wilayah DAS Kupang pada tahun 2020 menunjukkan banjir melanda 24 desa/kelurahan. Jika tidak ada kebijakan penanganan yang signifikan, luasan dan risiko banjir diperkirakan akan meluas dan meningkat, dimana 42 desa/kelurahan akan memiliki risiko banjir tinggi dan sangat tinggi, dengan estimasi luasan genangan di wilayah tersebut mencapai 5.700 ha pada tahun 2035. Bahkan beberapa desa /kelurahan diperkirakan akan tergenang permanen.
- » Tren bencana akibat variabilitas iklim sebagai implikasi dari perubahan iklim global seperti intensitas hujan ekstrem dan kenaikan muka laut, serta pengaruh dari faktor non-iklim seperti faktor geologis dan antropogenik turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah pesisir. Salah satu temuan dari kajian MCI menunjukkan penyebab dominan tingkat keparahan banjir pesisir tersebut, disamping peningkatan hujan ekstrem dan perubahan karakteristik pesisir, adalah penurunan muka tanah dengan rentang laju 0-34,5 cm/tahun (median 16,5 cm/tahun). Angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laju penurunan muka tanah di Semarang yang sebesar 15 cm/tahun, dan Jakarta 1-15 cm/tahun.
- » Analisa *Livelihood Vulnerability Index* (LVI) yang dilakukan di wilayah berisiko banjir tinggi di DAS Kupang memberikan gambaran tingkat kerentanan pada komponen sosial-ekonomi, mata pencaharian, bencana alam, kesehatan, pangan, dan sumber daya air saat ini yang menentukan sensitivitas rumah tangga terdampak bencana. Berdasarkan hasil LVI, kerentanan tertinggi berada pada aspek mata pencaharian, sehingga diperlukan perhatian khusus pada aspek ini agar tidak menimbulkan dampak berantai pada aspek lainnya. Aspek lain yang juga menunjukkan kerentanan tinggi adalah timbulnya penyakit, masalah sosial ekonomi dan ketersediaan air bersih.
- » Mercy Corps Indonesia bekerjasama dengan beberapa peneliti juga menghitung kerugian akibat banjir di Pekalongan pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 1,55 Triliun/tahun. Kerugian tersebut meliputi kerugian materiil seperti penurunan nilai hingga hilangnya aset dan pendapatan, dan juga biaya tambahan untuk layanan dasar: air bersih, pangan, energi, serta pengolahan limbah. Sementara kerugian non materiil berupa gangguan kesehatan mental serta menurunnya produktivitas lahan dan jasa ekosistem. Kerugian ini meningkat tajam pada tahun 2035 mencapai Rp. 31,28 Triliun/tahun atau 20 kali lipat dari kerugian tahun 2020. Porsi kerugian materiil terbesar ada pada biaya adaptasi dan perbaikan aset, penurunan pendapatan dan peningkatan modal; sementara kerugian non-materiil terbesar ada pada penurunan produktivitas pertanian dan tambak.



▶ LANGKAH ADAPTASI MENUJU MASA DEPAN BERKETAHANAN

» Adaptasi merupakan respon untuk pulih ke kondisi semula atau berubah menyesuaikan diri dan berganti perilaku agar lebih mudah menghadapi tekanan bencana banjir. Adaptasi masyarakat dalam kondisi bencana banjir diperlukan agar mampu membangun ketahannya terhadap risiko banjir. Langkah-langkah adaptasi perlu dibangun dengan memperhatikan konteks Risiko dan Dampak Iklim di wilayah DAS Kupang. Beberapa langkah adaptasi diperlukan terutama pada aspek kehidupan masyarakat yang rentan, antara lain:

1. Banjir telah berpengaruh besar terhadap **mata pencaharian**.

a. Masyarakat bermata pencaharian pertanian dan perikanan budidaya kehilangan lahan produktifnya sehingga harus beralih mata pencaharian menjadi buruh pekerja. Dalam hal ini diperlukan alternatif sumber penghidupan bagi masyarakat ataupun bentuk mata pencaharian yang adaptif dan berketahanan.

b. Masyarakat bermata pencaharian non-pertanian (wirausaha batik, pedagang, jasa, dan transportasi) mengalami peningkatan biaya modal untuk melakukan aktivitas semula, serta juga potensi penurunan pendapatan akibat terganggunya akses menuju lokasi berusaha. Sehingga diperlukan tindakan yang mampu mempermudah masyarakat terdampak untuk berusaha.

2. Banjir juga telah **mendisrupsi nilai dan budaya di masyarakat**.

Beberapa masalah sosial ekonomi dihadapi warga seperti tingkat pendidikan yang rendah (dominasi kepala keluarga berpendidikan SD), penduduk usia non-produktif yang banyak, budaya tolong-menolong yang mulai luntur, dan banyaknya perempuan kepala keluarga. Tidak hanya itu, tidak terencana dinamika perkotaan dan kependudukan juga memberikan konsekuensi dari sisi sosio-ekonomi. Implikasi dari pertumbuhan penduduk dan interaksinya dengan sektor ekonomi menjadi buah simalakama tanpa perencanaan dan pengendalian yang tepat. Masalah-masalah tersebut perlu dilakukan intervensi dari berbagai pihak terutama melalui berbagai fasilitasi dan dukungan materiil dan moril bagi kelompok rentan.

3. Banjir meningkatkan peluang **penyebaran penyakit akibat kondisi lingkungan buruk**. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Masalah-masalah kesehatan tersebut perlu dilakukan intervensi dari pihak terkait di bidang kesehatan.

4. Penyediaan **air bersih** penting bagi masyarakat terdampak banjir karena air sumur warga sudah menjadi payau. Di tengah belum optimalnya layanan air bersih dan ketiadaan sumber air alternatif, masyarakat tetap memanfaatkan air tanah payau tersebut. Tidak hanya memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat, namun pemanfaatan air tanah ini juga dapat memberikan efek domino negatif pada lingkungan fisik. Untuk itu diperlukan peningkatan sarana air bersih yang mampu menjangkau wilayah terdampak dengan memanfaatkan sumber air yang lebih berkelanjutan. Inisiatif yang bersifat pemecahan masalah seperti Pengembangan Waduk SPAM Regional Petanglong menjadi penting.

5. **Frekuensi kejadian banjir pesisir semakin meningkat** dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai lebih dari 9 kali setahun dengan ketinggian banjir di atas 0,5 meter bahkan di beberapa tempat mencapai di atas 1 meter. Oleh karena itu diperlukan penanganan teknis infrastruktur untuk mengurangi frekuensi, luasan dan tinggi genangan. Untuk menjamin keberlanjutan manfaat dari infrastruktur ini, pengembangannya perlu dilakukan di bawah payung pengelolaan sumber daya air terpadu dengan mengadopsi prinsip adaptif dan berketahanan serta juga mengaplikasikan perspektif ketataruangan.





URGENSI KEBIJAKAN YANG TRANSFORMATIF UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN BANJIR

- » Banjir di pesisir Pekalongan merupakan isu lintas wilayah administrasi yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki wewenang yang krusial karena mencakup DAS Kupang serta wilayah pesisir dan kelautan yang berada dalam otoritas Provinsi. Secara geografis, banjir tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan hulu dan hilir pada DAS yang harus dijaga keseimbangan fungsi dan ekosistemnya di keseluruhan wilayah. Banjir juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan, sehingga keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah menjadi urgen. Isu ini juga terjadi pada wilayah lain di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang dan Demak. Sebagai implikasinya, kebijakan yang diambil tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sementara isu bencana iklim telah menjadi perhatian pemangku kepentingan di berbagai tingkat, maka banjir di pesisir Pekalongan dapat menjadi isu dalam kerjasama multipihak dalam bidang perubahan iklim.
- » Mercy Corps bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas lokal, dan organisasi terkait merumuskan beberapa alternatif kebijakan dalam rangka penanganan banjir pesisir ini, yaitu:

1. Adaptasi Kawasan & Kewilayahan melalui Rencana Tata Ruang

Penataan ruang menjadi strategi yang menyeluruh lintas sektor dan lintas wilayah. Keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai dengan Peraturan Zonasi sebagai acuan perijinan pemanfaatan ruang perlu dilakukan antara RTRW Kota Pekalongan dan RTRW Kabupaten Pekalongan. Bahkan RTRW Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2022 ini dalam proses revisi, perlu memperhatikan tren ancaman bencana atau skenario risiko bencana yang terjadi di pesisir Pekalongan. Pendekatan keseimbangan fungsi dalam DAS perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang pada wilayah ini.

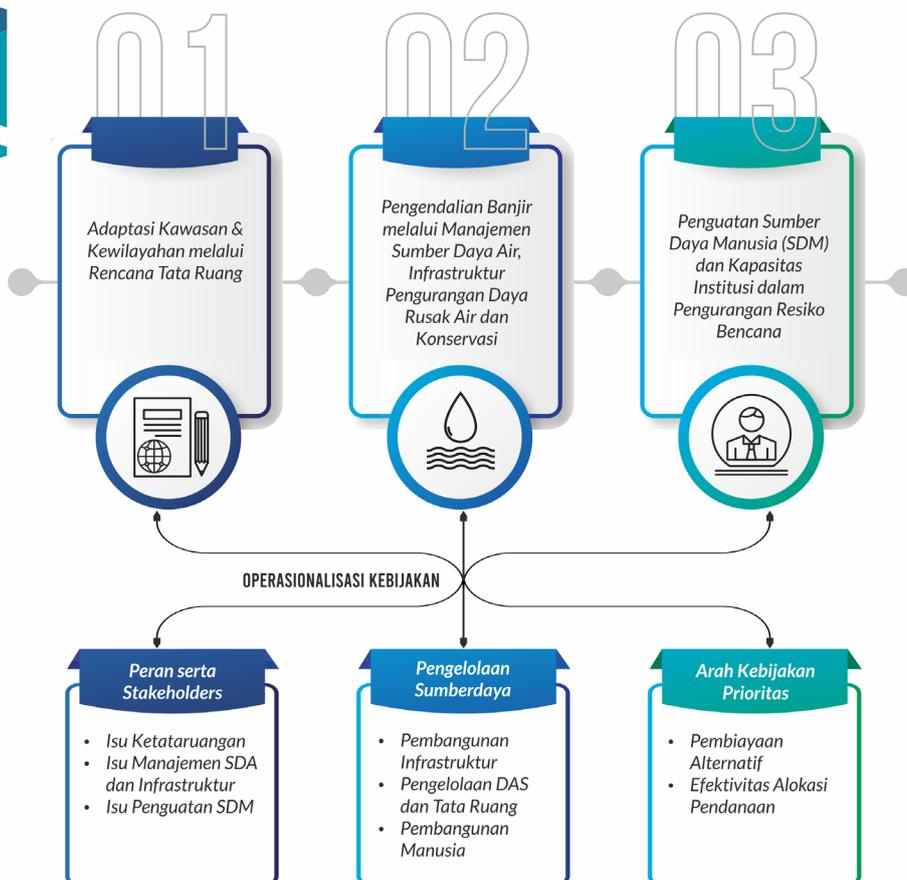
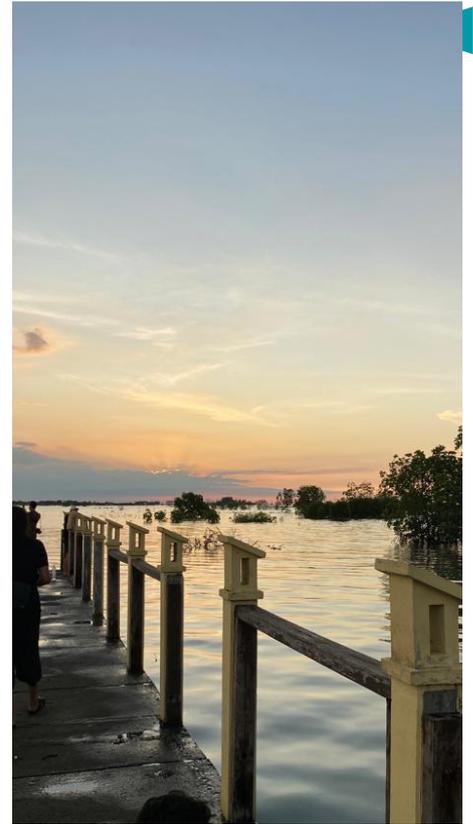
2. Pengendalian Banjir melalui Manajemen Sumber Daya Air, Infrastruktur Pengurangan Daya Rusak Air dan Konservasi

Peningkatan risiko banjir meluas tidak hanya pada wilayah hilir (pesisir) namun juga bagian tengah DAS. Untuk itu diperlukan keterpaduan pengelolaan hulu-hilir DAS, perbaikan infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir, seperti sistem drainase yang baik. Pengembangan infrastruktur yang bersifat fisik ini harus berjalan seimbang dengan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk memastikan pengendalian banjir dapat dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran dan berdampak. Pengelolaan kawasan konservasi perlu ditingkatkan tidak terbatas pada kawasan hulu seperti kawasan hutan lindung dan resapan air, tetapi juga di hilir seperti ekosistem mangrove.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Institusi dalam Pengurangan Risiko Bencana

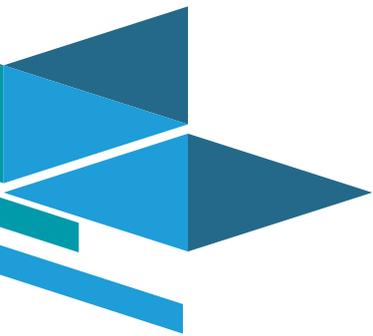
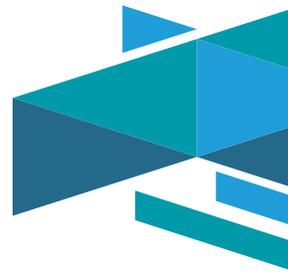
Penguatan SDM dan kelembagaan diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat beradaptasi dengan banjir pesisir (masyarakat Tangguh bencana). Berbagai program bantuan tanggap darurat dan mitigasi bencana banjir pesisir juga diperlukan termasuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi seperti alternatif penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) maupun pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

- » Operasionalisasi alternatif kebijakan di atas tentu membutuhkan peta jalan jangka panjang yang jelas dan terarah.
 - ◊ Dalam konteks **pihak yang terlibat**, diperlukan lebih banyak peran multipihak yang juga memiliki peranan di dalam isu ketataruangan (asosiasi profesi, akademisi, dan pemerintah pusat), isu manajemen DAS dan infrastruktur SDA (pemerintah provinsi, pemerintah pusat, NGOs dan lembaga think-tank), serta penguatan SDM (LSM lokal, pemerintah kota kabupaten serta kalangan bisnis) untuk dapat menjalankan penguatan kebijakan berketahanan melalui peran masing-masing.
 - ◊ Untuk itu diperlukan juga **arah kebijakan prioritas**, yang berangkat dari awalnya sekedar bertahan (pembangunan infrastruktur) menjadi berketahanan (termasuk juga pengembangan alternatif mata pencaharian demi masyarakat yang lebih adaptif).
 - ◊ Diatas semuanya, peran **pengelolaan sumberdaya pendanaan** menjadi sangat penting, bahwa keterbatasan wewenang dan pendanaan daerah hanya dapat dijawab melalui eksplorasi skema pembiayaan alternatif. Inovasi dalam pembiayaan ini memungkinkan peran dari lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Donor internasional, Lembaga bentukan PBB, lembaga keuangan, serta sektor swasta.



- » Untuk mampu menjawab isu yang kompleks dan sangat dinamis ini, kebijakan yang dikembangkan haruslah transformatif dan adaptif. Kebijakan yang transformatif didorong untuk membangun strategi dan langkah adaptif yang kolektif dan inovatif dari berbagai aktor serta mengisi gap koordinasi yang selama ini terjadi. Transformasi haruslah menjadi proses yang terencana dengan baik yang menitikberatkan pada pemicu potensi risiko, memperhitungkan ambang batas sosial dan ekologis, perubahan dan efek yang diperlukan, serta juga dinamika tata kelola, untuk memastikan kesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, perspektif transformatif ini juga harus dilandasi oleh kemampuan adaptasi berbagai pihak untuk memberikan respon berulang terhadap risiko dan ketidakpastian yang berpotensi muncul.





Contact

Denia Aulia Syam
Program Manager and Advocacy Specialist
Zurich Flood Resilience Alliance |
Mercy Corps Indonesia dsyam@id.mercycorps.org

www.floodresilience.net @[floodalliance](https://twitter.com/floodalliance)

Agung Pangarso
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Tengah

agung.pangarso@gmail.com